

PROYEKSI PENERIMAAN NEGARA TAHUN 2026: ANALISIS TARGET RP3.147 TRILIUN OLEH PEMERINTAHAN PRABOWO

Ryan Ibko Albana¹, Raisya Ramadhania², Astri Ivo³, Mega Metalia⁴, Ratna Septiyanti⁵^{1,2,3,4,5}Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Kota Bandar LampungEmail: Ryanibkkoalbana2004@gmail.com¹, raisyaramadhanias@gmail.com², astriiv@gmail.com³, mega.metalia@feb.unila.ac.id⁴, ratna.septiyanti@feb.unila.ac.id⁵

ABSTRACT

The 2026 State Budget (APBN) proposed by President Prabowo Subianto on August 15, 2025, emphasizes the consistency of taxes as an instrument of justice and a means of revenue redistribution. The state revenue target is set at IDR 3,147 trillion, with a focus on increasing tax revenue while still taking into account the investment climate and business sustainability. The fiscal policy strategy is implemented through targeted and measurable fiscal incentives to maintain national economic stability. On the expenditure side, the government plans an allocation of IDR 3,786.5 trillion, resulting in a deficit of IDR 638.8 trillion, or 2.48% of Gross Domestic Product (GDP). This deficit position is still in accordance with the provisions of the State Finance Law and is lower than the 2025 APBN outlook, thus indicating a more controlled fiscal policy direction. The research method used is a qualitative descriptive approach with secondary data analysis sourced from official government documents, APBN reports, and publications related to fiscal and tax policy in Indonesia. This analysis contributes to the development of literature on Indonesian fiscal policy and serves as an academic reference in understanding the relationship between tax revenue, budget deficits, and economic stability.

Keywords: Fiscal Policy, Tax Revenue, Budget Deficit, Economic Stability.

ABSTRAK

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang diajukan Presiden Prabowo Subianto pada 15 Agustus 2025 menekankan konsistensi pajak sebagai instrumen keadilan sekaligus sarana redistribusi pendapatan. Target penerimaan negara ditetapkan sebesar Rp3.147 triliun, dengan fokus pada peningkatan penerimaan perpajakan yang tetap memperhatikan iklim investasi dan keberlanjutan usaha. Strategi kebijakan fiskal ditempuh melalui insentif fiskal yang bersifat terarah dan terukur guna menjaga stabilitas ekonomi nasional. Di sisi belanja, pemerintah merencanakan alokasi sebesar Rp3.786,5 triliun sehingga menimbulkan defisit Rp638,8 triliun atau 2,48% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Posisi defisit tersebut masih sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara dan lebih rendah dibandingkan outlook APBN 2025, sehingga menunjukkan arah kebijakan fiskal yang lebih terkendali. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi literatur dengan analisis data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi pemerintah, laporan APBN, serta publikasi terkait kebijakan fiskal dan perpajakan di Indonesia. Analisis ini memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur mengenai kebijakan fiskal Indonesia serta menjadi referensi akademik dalam memahami hubungan antara penerimaan perpajakan, defisit anggaran, dan stabilitas ekonomi.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Penerimaan Pajak, Defisit Anggaran, Stabilitas Ekonomi.

Article history

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism checker no 1383

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen utama pemerintah dalam mengatur keuangan negara serta menjaga stabilitas makroekonomi. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara penerimaan dan pengeluaran negara demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Setiap tahun, struktur APBN merefleksikan respons pemerintah terhadap kondisi ekonomi nasional maupun global, termasuk strategi menghadapi tantangan inflasi, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan (Kemenkeu RI, 2025). Oleh karena itu, APBN tidak hanya berfungsi sebagai dokumen anggaran, tetapi juga sebagai alat kebijakan ekonomi yang menentukan arah pembangunan nasional.

Tahun 2026 menjadi periode penting karena merupakan tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam merumuskan arah kebijakan fiskal jangka menengah. Pemerintah menetapkan tema besar “*Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi Menuju Indonesia Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera*”, yang mencerminkan komitmen terhadap kemandirian ekonomi nasional (Press, 2025). Dalam rancangan APBN 2026, target penerimaan negara ditetapkan sebesar Rp3.147 triliun dengan fokus pada optimalisasi penerimaan pajak tanpa mengganggu iklim investasi. Kebijakan ini menunjukkan upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan prinsip keberlanjutan fiskal (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2025).

Pemerintah juga merencanakan defisit anggaran sebesar Rp638,8 triliun atau sekitar 2,48% dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang masih sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara. Secara teori, defisit ini mencerminkan kebijakan fiskal ekspansif yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran di tengah tantangan ekonomi global (Britania et al., 2024). Meski bersifat ekspansif, kebijakan ini tetap mempertahankan disiplin fiskal dengan menjaga rasio defisit di bawah 3% dari PDB, menandakan pengelolaan anggaran yang hati-hati dan terukur. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Namun, target penerimaan pajak yang tinggi bukan tanpa tantangan. Dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan pajak Indonesia cenderung fluktuatif. Pandemi COVID-19 sempat menekan penerimaan pada 2020, sebelum mengalami pemulihan signifikan di tahun-tahun berikutnya. Meskipun begitu, rasio pajak terhadap PDB masih relatif rendah, turun dari 10,4% pada 2022 menjadi sekitar 10,1% pada 2024, dan diproyeksikan meningkat kembali menjadi 10,3% pada 2026 (Ananda, 2020). Pemerintah berupaya memperkuat basis pajak melalui intensifikasi, ekstensifikasi, serta reformasi administrasi perpajakan, termasuk penerapan *Core Tax Administration System* untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan kepatuhan wajib pajak (Maurinawati, 2025).

Selain itu, dinamika ekonomi global turut memengaruhi kebijakan fiskal nasional. Ketidakpastian geopolitik, disrupti rantai pasok, dan kebijakan moneter ketat di negara maju menciptakan volatilitas pasar yang menuntut kehati-hatian fiskal (Fadilah, 2025). Oleh karena itu, kebijakan fiskal Indonesia diarahkan untuk berfungsi sebagai *shock absorber* terhadap guncangan eksternal sekaligus memperkuat daya saing domestik melalui investasi pada sektor strategis seperti pangan, energi, dan infrastruktur. Keseimbangan antara peningkatan penerimaan, efisiensi belanja, serta pengendalian defisit menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di awal pemerintahan baru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai arah, strategi, dan implikasi kebijakan fiskal yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026, Waruwu (2024). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena ekonomi secara komprehensif berdasarkan data dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari berbagai sumber resmi dan kredibel, Adityaningrum, et al., (2023). Sumber data utama meliputi dokumen Rancangan APBN 2026 dan Nota Keuangan, laporan resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), serta kajian dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik kebijakan fiskal, perpajakan, dan defisit anggaran di Indonesia. Data pendukung juga diperoleh dari laporan lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk memperkaya analisis dalam konteks global.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan data yang berhubungan dengan kebijakan fiskal, penerimaan perpajakan, defisit anggaran, dan stabilitas ekonomi nasional. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif (analitis), yang bertujuan untuk menguraikan kondisi fiskal Indonesia secara sistematis serta menilai konsistensi antara kebijakan penerimaan dan belanja negara dalam menjaga keseimbangan *fiscal*, Ramdhan, (2021). Analisis dilakukan dengan membandingkan capaian indikator makroekonomi pada periode sebelumnya (APBN 2024 dan 2025) dengan rencana kebijakan fiskal 2026 untuk melihat arah pengendalian defisit serta efektivitas pajak sebagai instrumen redistribusi pendapatan. Hasil analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai peran kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat literatur akademik di bidang ekonomi publik dan keuangan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Struktur dan Target Penerimaan Negara

Total penerimaan negara tahun 2026 sebesar Rp 3.147,7 triliun, terdiri atas:

- 1) Penerimaan Pajak: Rp 2.357,7 triliun, meningkat 13,5% dibanding 2025,
- 2) PNBP: Rp 455 triliun, turun moderat akibat penurunan harga komoditas,
- 3) Kepabeanaan dan Cukai: Rp 334,3 triliun, naik 6,2% (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

Komposisi ini menunjukkan bahwa 74,9% penerimaan negara masih bergantung pada pajak, menandakan pentingnya efektivitas reformasi perpajakan.

Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak

Empat strategi utama ditetapkan pemerintah:

- a) Perluasan basis pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis data (Redaksi Pajakku, 2025).
- b) Peningkatan kepatuhan dengan implementasi Core Tax Administration System (Coretax) dan Compliance Risk Management.
- c) Reformasi perpajakan berkelanjutan untuk meningkatkan tax ratio dan integrasi internasional.

- d) Pengelolaan insentif fiskal yang selektif untuk mendorong investasi dan hilirisasi industri (DJP, 2025).

2. Arah Kebijakan Fiskal dalam APBN 2026

APBN 2026 merupakan APBN pertama yang disusun langsung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan visi misi yang berfokus pada mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera (Press, 2025).

Kebijakan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk merespons dinamika ekonomi dan geopolitik global yang penuh ketidakpastian, dengan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, peningkatan investasi dan ekspor, serta penguatan inovasi dan kualitas sumber daya manusia.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%, pengendalian inflasi pada kisaran 2,5%, dan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) pada angka sekitar 6,9% (Kemenkeu RI, 2025).

Untuk mencapai target ini, kebijakan fiskal ditempuh secara ekspansif namun terarah dan terukur, dengan fokus memperkuat kualitas belanja negara, mengoptimalkan pendapatan, serta menjaga iklim investasi yang kondusif.

Menurut Fadilah (2025), kebijakan fiskal 2026 difokuskan pada delapan agenda prioritas:

1. Ketahanan pangan,
2. Ketahanan energi,
3. Program makan bergizi gratis,
4. Pendidikan bermutu,
5. Kesehatan berkualitas,
6. Pembangunan desa dan pemberdayaan koperasi serta UMKM, Pertahanan semesta.
7. Akselerasi investasi dan perdagangan global.

Anggaran ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp164,7 triliun, sedangkan ketahanan energi sebesar Rp402,4 triliun untuk mendorong peningkatan lifting migas dan percepatan transisi energi ramah lingkungan (Media Keuangan Kemenkeu, 2025).

Fokus kebijakan ini juga mencakup harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah agar lebih efektif dan berkelanjutan. Menurut Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (2025), peningkatan penerimaan negara tidak dilakukan melalui tarif baru, melainkan dengan reformasi perpajakan yang mencakup perluasan basis pajak, intensifikasi, ekstensifikasi, serta pemanfaatan teknologi dalam pengawasan.

3. Peningkatan Penerimaan Pajak dan Keadilan Fiskal

Target penerimaan pajak tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun, meningkat 13,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio pendapatan negara terhadap PDB diantisipasi mencapai 11,71% hingga 12,31% (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

Kebijakan penerimaan pajak tahun 2026 diarahkan melalui empat langkah strategis:

- a) Perluasan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi,
- b) Peningkatan kepatuhan wajib pajak berbasis teknologi,
- c) Penguatan reformasi dan harmonisasi kebijakan perpajakan internasional, dan
- d) Pengelolaan insentif pajak untuk mendorong investasi dan hilirisasi industri bernilai tambah tinggi.

Strategi ini diimplementasikan melalui optimalisasi Core Tax Administration System (Coretax) dan Compliance Risk Management untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan. Selain itu, dilakukan sinergi antarunit melalui joint audit, joint analysis, joint investigation, joint collection, dan joint intelligence untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Slamet & Ramadhani, 2022).

Dari sisi keadilan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kebijakan perpajakan tetap menjaga asas keadilan, terutama untuk rakyat kecil dan pelaku UMKM. Pemerintah juga menertibkan shadow economy seperti sektor perdagangan eceran, usaha makanan dan minuman, perdagangan emas, serta perikanan agar keadilan perpajakan dapat terwujud (Redaksi Pajakku, 2025).

4. Hubungan Kebijakan Fiskal terhadap Stabilitas Ekonomi Nasional

Kebijakan fiskal berperan sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui fungsi stabilisasi, distribusi, dan alokasi (Britania et al., 2024).

APBN berfungsi sebagai shock absorber atau penyangga bagi dampak negatif dari ketidakpastian global, dengan kemampuan merespons situasi darurat melalui kebijakan counter-cyclical.

Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif saat ekonomi melemah dan kebijakan fiskal ketat ketika inflasi tinggi, untuk menjaga keseimbangan makroekonomi.

Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci stabilitas ekonomi, karena keduanya saling memengaruhi.

Dalam konteks APBN 2026, pemerintah memperkuat kerja sama dengan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan distribusi pangan dan stabilitas harga tetap terkendali (Kemenkeu RI, 2025).

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, kebijakan fiskal 2026 menunjukkan arah yang ekspansif dan produktif. Pemerintah menargetkan peningkatan penerimaan tanpa menambah beban masyarakat, terutama melalui reformasi sistem perpajakan digital seperti Coretax yang memperkuat integrasi data dan pengawasan berbasis risiko (Maurinawati, 2025).

Kebijakan ini sejalan dengan pendekatan counter-cyclical, di mana belanja publik digunakan untuk merangsang perekonomian di tengah tekanan eksternal. Pendekatan tersebut dinilai tepat untuk menjaga momentum pertumbuhan nasional sekaligus memperkuat daya tahan fiskal jangka menengah.

Selain itu, pemerintah menekankan keadilan fiskal, dengan tidak menaikkan tarif pajak baru serta memberikan insentif bagi sektor produktif dan UMKM. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah (Redaksi Pajakku, 2025).

Dari sisi stabilitas makro, koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia berperan penting untuk menekan inflasi dan menjaga nilai tukar rupiah. Kombinasi kebijakan fiskal ekspansif dan moneter yang berhati-hati menjadi strategi ideal untuk menghadapi gejolak ekonomi global (Britania et al., 2024).

Dengan demikian, arah kebijakan fiskal APBN 2026 tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan pendapatan negara, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Target penerimaan negara tahun 2026 mencerminkan optimisme fiskal pemerintah baru. Dengan pertumbuhan ekonomi 5,4%, target Rp 3.147 triliun menunjukkan keberanian dalam mengakselerasi pendapatan tanpa menaikkan tarif pajak.

Namun, tantangan tetap signifikan. Pertama, ketergantungan pada sektor pajak membuat risiko penerimaan tinggi terhadap perlambatan ekonomi. Kedua, digitalisasi sistem perpajakan seperti Coretax membutuhkan kesiapan infrastruktur dan SDM agar efektif. Ketiga, ketidakpastian global (harga energi, geopolitik) dapat menekan ekspor dan PNB.

Dari sisi keadilan fiskal, Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya menjaga asas keadilan terutama bagi UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah (Kemenkeu RI, 2025). Oleh karena itu, strategi fiskal diarahkan tidak hanya untuk mengejar angka penerimaan, tetapi juga menjaga kesejahteraan rakyat melalui insentif produktif dan pengawasan ekonomi informal.

Koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi sangat penting. Jika fiskal ekspansif tidak diimbangi dengan kebijakan moneter yang hati-hati, risiko inflasi meningkat. Oleh sebab itu, sinergi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar, inflasi, dan suku bunga agar tetap mendukung pertumbuhan berkelanjutan (Britania et al., 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Proyeksi penerimaan negara sebesar Rp 3.147 triliun dalam RAPBN 2026 oleh pemerintahan Prabowo Subianto merepresentasikan ambisi fiskal yang kuat untuk membangun ekonomi nasional yang tangguh dan berdaulat. Target ini secara umum realistis apabila didukung oleh reformasi administrasi pajak, perluasan basis pajak, dan peningkatan efisiensi belanja negara.

Namun demikian, pemerintah perlu memperkuat tata kelola fiskal, meningkatkan sinergi kebijakan lintas sektor, dan menjaga stabilitas ekonomi makro agar proyeksi ini tidak hanya menjadi angka optimistis, tetapi juga dapat terealisasi secara berkelanjutan.

Saran

Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur digital perpajakan serta memperluas edukasi wajib pajak agar kepatuhan meningkat.

Diperlukan kebijakan fiskal yang adaptif terhadap gejolak global melalui diversifikasi sumber penerimaan.

Pengawasan dan transparansi belanja publik harus terus ditingkatkan untuk menjaga kredibilitas fiskal.

Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis kontribusi reformasi pajak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityaningrum, A., Arsad, N., & Jusuf, H. (2023). Faktor Penyebab Stunting di Indonesia: Analisis Data Sekunder Data Ssgi Tahun 2021. *Jambura Journal of Epidemiology*, 2(1), 1-10.
- Ananda, W. R. (2020). *Analisis Atas Realisasi Penerimaan PPH Dan PPN Yang Dipengaruhi Oleh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Britania, Y., Septiani, D., Ghibran, M. H., & Siregar, P. A. (2024). Peran Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Menjaga Dan Menciptakan Stabilitas Perekonomian Indonesia Menurut Perspektif Islam. *Media Mahardhika*, 22(3), 417-428.
- Fadilah, D. (2025). Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(6).
- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. (2025, 2 September). *Sri Mulyani Pastikan 2026 Tanpa Pajak Baru, Fokus Tingkatkan Kepatuhan*.
- Kemenkeu RI. (2025, 23 Desember). *APBN 2026 Motor Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Maurinawati, H., (2025, 25 September). *Perjalanan Coretax dan Konsistensi Perubahan DJP*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Press, U. G. M. (2025). *Tantangan Presiden Ke-8 Republik Indonesia: Pemikiran Akademisi Universitas Gadjah Mada*. UGM PRESS.
- Purwowidho. (2025, 6 Oktober). *APBN 2026: Tujuan dan Arah Kebijakan*. Media Keuangan Kementerian Keuangan.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Redaksi Pajakku. (2025, 21 Agustus). *Strategi Pemerintah Atasi Shadow Economy Tahun 2026*. Artikel Pajakku.
- Saeroji, O. 19 September 2025. *Tak Ada Kenaikan dan Pungutan Pajak Baru pada 2026*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Slamet, K., & Ramadhani, S. P. (2022). Program Joint Analysis Sebagai Bentuk Sinergisme Antarunit Di Lingkungan Kementerian Keuangan. *Bunga Rampai*, 183.
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198-211.